

Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya

Hafizh Rizqi Rajendra¹, Diana Amalia²

¹⁻²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email penulis / korespondensi : 20043010083@student.upnjatim.ac.id¹,
diana_amalia.ilkom@upnjatim.ac.id²

ABSTRAKSI

Kemiskinan merupakan masalah yang saling berkaitan dengan kurangnya kemampuan dalam mengakses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Untuk mengatasinya kemiskinan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota melaksanakan program Padat Karya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai dinas dan pelaku UMKM setempat. Kegiatan tersebut juga melibatkan mahasiswa program magang dan studi independen sebagai pelaksana survei di lapangan. Kegiatan program Padat Karya bertujuan untuk mendukung pelaksanaan survei dan pendataan penerima manfaat program Padat Karya di kelurahan Pegirian, kecamatan Semampir. Pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahap, yaitu pengarahan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), survei lapangan, serta penyusunan dan pelaporan hasil survei. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program ini, dan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan warga terhadap keberlanjutan program Padat Karya di Surabaya.

Kata kunci : kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, program Padat Karya, survei

ABSTRACT

Poverty is a complex issue closely linked to the inability to access economic opportunities, socio-cultural resources, political engagement, and community participation. To tackle poverty in Surabaya, the City Government has implemented the Labor-Intensive program aimed at empowering low-income communities and families in need. This initiative is carried out in collaboration with various agencies and local small and medium-sized enterprises (MSMEs). The program also involves students who participate in internship programs and independent studies, assisting with field surveys. The activities of the Labor-Intensive program are designed to support the implementation of surveys and data collection regarding beneficiaries in the Pegirian sub-district of Semampir district. The process consists of three main stages: guidance provided by the Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil), conducting field surveys, and preparing and reporting the survey results. The outcomes of these activities have shown strong public enthusiasm for

the program. It is expected that this initiative will enhance coordination between the government and the community, as well as increase public trust in the sustainability of the Labor-Intensive program in Surabaya.

Keywords: *community empowerment, poverty, Padat Karya program, surveys*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial di Indonesia yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan. Kemiskinan merupakan masalah yang saling berkaitan dengan kurangnya kemampuan dalam mengakses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 terdapat 25,22 juta penduduk miskin di Indonesia, atau sekitar 9,03% dari total populasi. Meskipun terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak, terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi tekanan ekonomi yang lebih tinggi akibat urbanisasi dan ketimpangan akses pekerjaan (BPS, 2024). Dalam konteks perkotaan seperti Surabaya, tantangan tersebut semakin kompleks karena tingginya laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lapangan kerja formal. Oleh karena itu, program Padat Karya menjadi salah satu solusi strategis yang bersifat jangka pendek namun berdampak langsung, karena dapat menyerap tenaga kerja lokal secara cepat dan memberikan penghasilan sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Surabaya merespons masalah ini melalui pelaksanaan program Padat Karya yang dilandasi oleh Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya ini bekerja sama dengan dinas ataupun perusahaan lain dalam rangka mensejahterakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau yang sekarang diubah dengan sebutan GAKIN (warga miskin) warga Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga terus berupaya dalam mengurangi kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat-nya, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan juga program Padat Karya ini. Program yang berjalan mulai dari tahun 2021 ini digencarkan oleh Eri Cahyadi selaku Walikota Surabaya. Padat Karya dibuat karena sempat adanya pandemic COVID-19 yang membuat banyak usaha dan perekonomian anjlok, banyaknya PHK di perusahaan membuat banyak sektor terdampak. Pada tahun 2022, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memanfaatkan aset pemerintah Kota Surabaya berupa lahan kosong atau lahan tidur yang tersebar di seluruh Kota Surabaya. Lahan tersebut dioptimalkan menjadi beberapa sektor pertanian maupun non pertanian seperti usaha café, laundry, sentra jahit, dll. Program ini juga dibuat agar dapat membangun citra positif dari

Pemerintah Kota Surabaya dan juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

Pelaksanaan program Padat Karya di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Surabaya memiliki urgensi yang tinggi mengingat kawasan ini merupakan salah satu wilayah padat penduduk dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih relatif rendah. Banyak warga Pegirian menggantungkan hidup pada sektor informal dan pekerjaan harian yang rentan terhadap gejolak ekonomi, seperti naiknya harga kebutuhan pokok atau terbatasnya lapangan kerja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan secara layak. Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dari keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Dalam perspektif multidimensional, kemiskinan mencakup aspek sosial, ekonomi dan kultural yang saling berkaitan, dimana eksklusif sosial dan keterbatasan partisipasi dalam pembangunan menjadi faktor yang memperparah kondisi kemiskinan (Alkire & Foster, 2011). Di Indonesia, pendekatan pengukuran kemiskinan oleh BPS (2024) masih mengacu pada konsep garis kemiskinan, yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Namun, pendekatan ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kompleksitas kemiskinan struktural, terutama di wilayah perkotaan padat seperti Surabaya, yang dipengaruhi oleh urbanisasi, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan lapangan kerja formal.

Program Padat Karya merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja sementara yang berbasis kegiatan fisik dan tidak padat modal, tetapi padat tenaga kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kerja dan penghasilan langsung kepada masyarakat miskin dan setengah pengangguran, terutama di wilayah perkotaan dan pedesaan yang memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi tinggi (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2021). Menurut Suharto (2009), program padat karya termasuk dalam intervensi kebijakan sosial yang bersifat remedial karena dirancang untuk menanggulangi kemiskinan jangka pendek dengan cara menyediakan pekerjaan bagi kelompok yang terdampak krisis ekonomi.

METODOLOGI

Pelaksanaan program Padat Karya dilakukan dengan menggunakan metode *direct lobbying* dan negosiasi kolaborasi. Menurut Bryson (2018), *direct lobbying* adalah komunikasi langsung dengan pembuat keputusan untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan tertentu. Sedangkan menurut Fisher, Ury dan Patton (2011), negosiasi kolaborasi adalah pendekatan negosiasi yang berfokus pada

kepentingan bersama, bukan posisi yang bertentangan sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak.

Pada praktik *lobbying* terdapat dua strategi dalam melakukan lobi yaitu, *direct lobbying* dan *indirect lobbying*. *Direct Lobbying* adalah taktik melobi yang digunakan oleh pihak-pihak dengan cara mempertemukan perwakilan kelompok secara tatap muka. Pada saat yang sama, *Indirect Lobbying* dilakukan melalui media, demonstrasi dan kampanye. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memiliki hubungan dengan banyak pihak dalam mencapai tujuannya. Dalam mewujudkan program yang akan dibuat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bekerja sama dengan beberapa dinas. Berikut beberapa penerapan stakeholder pada program yang diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya :

Program Padat Karya yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjalin kerja sama dengan UMKM setempat dan juga berbagai dinas, sebagai berikut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; Dinas Kesehatan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertahanan ; Dinas Sosial; dan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Melalui kerja sama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dapat membuka hingga 23 pilihan pekerjaan yang dapat dipilih oleh warga yang menjadi target program Padat Karya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Sosialisasi dan Pengarahan oleh Camat & Lurah Setempat

Kegiatan sosialisasi dan pengarahan terkait pelaksanaan program Padat Karya dilaksanakan di Gedung Siola pada tanggal 8 April 2023. Sosialisasi difokuskan pada pelaksanaan survei warga miskin sebagai bagian dari Program Padat Karya. Sosialisasi ini dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama yang diikuti oleh pegawai ASN dan non-ASN Dispendukcapil, serta sesi kedua yang diikuti oleh seluruh mahasiswa magang. Sosialisasi memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan program Padat Karya, mekanisme penawaran pekerjaan kepada masyarakat sasaran, serta tata cara penggunaan dan pembaharuan data melalui website Padat Karya.

Selain, peserta juga diperkenalkan kepada camat dan lurah dari wilayah sasaran program, termasuk kecamatan Semampir dan kelurahan Pegirian. Kegiatan ini bertujuan agar para mahasiswa memahami struktur koordinasi pemerintahan setempat dan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program di lapangan. Melalui sosialisasi tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran program Padat Karya sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang difokuskan untuk meningkatkan kesempatan kerja,

mengurangi pengangguran serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.

2) Survey Lapangan di Kecamatan Semampir

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada implementasi program Padat Karya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, seluruh mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) serta pegawai yang terlibat diberikan waktu hingga Rabu, 12 April 2023 untuk menyelesaikan survei terhadap warga miskin yang telah ditentukan. Setiap peserta, baik mahasiswa ataupun pegawai, memperoleh target untuk mensurvei 15 orang warga miskin di wilayah Kecamatan Semampir.

Setelah menerima informasi dan arahan tersebut, penulis menuju lokasi sesuai dengan surat perintah kerja, yakni Kantor Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir. Kunjungan ini bertujuan untuk berkoordinasi dengan perangkat kelurahan serta kader yang ditugaskan membantu mahasiswa dalam proses survei lapangan. Penulis dibantu oleh kader kelurahan setempat guna mempermudah proses pencarian alamat warga dan memperlancar interaksi dengan masyarakat penerima manfaat. Selamat kegiatan survei berlangsung, penulis diwajibkan untuk memperbarui data hasil survei secara langsung melalui website resmi Program Padat Karya Kota Surabaya. Daya yang diunggah meliputi 1) Jenis pekerjaan atau bidang Padat Karya yang dipilih oleh warga, 2) Foto warga yang mengikuti program sebagai bentuk dokumentasi, 3) Tanda tangan warga sebagai bukti keabsahan dan keikutsertaan dalam program.



Gambar 1. Sosialisasi atau *Briefing* Sebelum Survey Langsung

Kegiatan survei ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan program Padat Karya sebagai strategi penanggulangan

kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Program Padat Karya. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan tujuan Pemerintah Kota Surabaya dalam mendukung percepatan pendataan masyarakat miskin berbasis data terpadu (One Data Surabaya) untuk perencanaan program sosial dan pemberdayaan ekonomi (Pemerintah Kota Surabaya, 2023).

3) Hasil Survey Lapangan Padat Karya

Setelah pelaksanaan survei lapangan di Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, penulis diminta untuk menyusun dan mengumpulkan rekapitulasi hasil survei Program Padat Karya yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya sebagai bukti pelaksanaan tugas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, diperoleh beberapa temuan penting terkait persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap program tersebut.

Pertama, warga yang berada pada usia produktif menunjukkan antusiasme tinggi terhadap adanya Program Padat Karya yang digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sebagian besar dari mereka memilih bidang pekerjaan di sektor jasa, seperti bekerja di kafe atau menjadi barista, dengan kisaran penghasilan sebagaimana tercantum dalam sistem daring Padat Karya. Kedua, masih terdapat jumlah warga yang memilih untuk bekerja sebagai pedagang kecil atau pelaku usaha mandiri. Selain itu, ditemukan pula sebagian warga yang menunjukkan sikap kurang percaya terhadap program ini. Keraguan tersebut muncul karena pengalaman sebelumnya, dimana beberapa warga pernah menerima tawaran serupa namun tidak terealisasi menjadi peluang kerja yang nyata.

Selanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Program Padat Karya diperlukan transparansi dalam penyampaian informasi, melibatkan secara aktif tokoh masyarakat, serta penyediaan bukti nyata hasil pelaksanaan program. Selain itu, kegiatan pendampingan berkelanjutan dan forum evaluasi partisipatif perlu dilakukan agar warga merasa dilibatkan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, Program Padat Karya tidak hanya menjadi kegiatan ekonomi sementara tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.

KESIMPULAN

Program Padat Karya yang dilaksanakan di Kecamatan Semampir, khususnya di Kelurahan Pegirian, merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini tidak hanya berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Melalui peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan Padat Karya, pemerintah dapat menekan dampak sosial ekonomi

yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun krisis ekonomi. Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Pegirian menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berbasis masyarakat serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kota Surabaya.

REFERENSI

- Alkire, S. & Foster, J. 2011. *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2024. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024. www.bps.go.id
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. 2011. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguon Books.
- Hasanah, K. 2019. Strategi Lobi Dan Negosiasi Nahdlatul Ulama Dalam Konflik Kebijakan Hari Sekolah. *Jurnal AlFuad*, Vol. 3, no. 2:h.h. 25–34.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. 2021. Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya. Jakarta: Kemenaker
- Laras, H., & Maryani, D. (2020). Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Membina Hubungan Baik Dengan Klien Pada PT Wijaya Karya Beton Tbk. *Pantarei*, 4(02).
- Lewicki, R.J., Barry, B., & Saunders, D.M. 2015. *Negotiation*. McGraw-Hill Education.
- Pemerintah Kota Surabaya. 2023. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya.
- Rahaju, T. (2007). Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. *Jurnal Demokrasi*, 6(1).
- Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Modal Jaminan Sosial Universal. Bandung: Refika Aditama
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. 2020. *Economic Development* (13th ed.) Pearson Education.